





































Ahmad Muhaimin, tahun 2009, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Hak-Hak Politik Perempuan, Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta”.<sup>29</sup> Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hak-hak politik dalam pandangan DPW Partai Persatuan Pembangunan setidaknya tidak lebih dari hak kebebasan memberikan suara dan aktif dalam pemilihan (termasuk pemilu), memberikan hak bagi perempuan untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memangku jabatan dan menjalankan fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai isteri bagi suaminya serta karirnya sebagai kader politik.

Meskipun persoalan yang diteliti sama, yaitu tentang peran publik perempuan khususnya di bidang politik, tetapi fokus penelitiannya berbeda. penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang persamaan dan perbedaan pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dan pandangan KH. Sahal Mahfudh terhadap peran publik perempuan sebagai anggota legislatif, kemudian menganalisa kesesuaiannya. Dengan perbedaan yang telah dipaparkan tersebut, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

---

<sup>29</sup> Ahmad Muhaimin, *Hak-Hak Politik Perempuan, Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta*, (Skripsi--Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).











